



# PERBANDINGAN VISI, MISI DAN PROGRAM CAPRES 2024 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

#PILIHYANGPEDULI  
#PILIHYANGJAGALINGKUNGAN

pemilu 2024

# Perbandingan Visi, Misi dan Program Capres 2024 Bidang Lingkungan Hidup

Dasar untuk menentukan visi dan misi capres adalah Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Presiden (siapapun pemenang pemilu) Menyusun visi misi dan programnya berpedoman pada RPJP Nasional (RPJMN), untuk lima tahun kedepan.

## I. Kedudukan visi, misi dan program Presiden dalam perencanaan pembangunan

Undang- undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional (RPJPN). RPJM Nasional merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dengan demikian, visi, misi dan program calon presiden yang nantinya akan dijabarkan dalam RPJM Nasional (bagi presiden terpilih) harus berpedoman pada RPJP Nasional dan dibuat untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

## II. RPJP Nasional

Pemilihan Umum tahun 2024 bertepatan dengan berakhirnya periode RPJPN 2005-2025, sehingga rujukan RPJPN hanya berdasar pada rancangan akhir yang disiapkan teknokrat dan belum disahkan oleh DPR menjadi UU sebagaimana yang dimandatkan dalam UU No 25 Tahun 2004.

Dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045 bulan Agustus 2023, visi Indonesia Emas 2024 adalah negara nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Visi Indonesia Emas 2024 diterangkan sebagai berikut :



### Negara Nusantara

negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia

### Berdaulat

Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya.

### Maju

Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar didunia berbasisan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara, Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tanggung, inovatif dan adil.

### Berkelanjutan

sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Visi ini kemudian dijalankan dalam lima sasaran utama visi Indonesia sebagai berikut:



Pendapatan perkapita setara dengan negara maju



Daya saing sumber daya manusia meningkat



kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang



Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission



Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat

Lima sasaran visi Indonesia 2045 yang terkait dengan lingkungan hidup adalah sasaran kelima yaitu intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission. Dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya Intensitas Emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan intensitas Emisi GRK di tahun 2010, dan menuju net zero emission pada 2060.

Lima sasaran visi Indonesia 2045 diwujudkan melalui 17 arah (tujuan), 8 misi (agenda) dan 45 indikator utama pembangunan. RPJP nasional juga memuat pentahapan pembangunan yang terbagi dalam 4 tahap yaitu :

1. tahap pertama tahun 2025 – 2029 adalah penguatan fondasi transformasi
2. tahap kedua tahun 2030 – 2034 dengan telah terwujudnya fondasi yang kuat, Indonesia melakukan akselerasi transformasi
3. tahap ketiga tahun 2035 – 2039 Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global
4. tahap keempat tahun 2040 – 2045 Indonesia berhasil mewujudkan Indonesia Emas 2045

Dalam tahap pertama Pembangunan, tahun 2025 – 2029, tahapan pembangunan yang terkait dengan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

## a. Transformasi ekonomi

Transformasi ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital diseluruh wilayah Indonesia, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya diluar pulau Jawa. Transisi energi difokuskan pada penerapan CCS/CCUS dan pembatasan pembangunan PLTU Batubara, pemanfaatan Energy Storage System, pengembangan PTL ET ( PLTA, PLTS, PLTP, PLTB dan PTL Biomassa), penyiapan regulasi dan kelembagaan PLTN, hidrogen dan amonia rendah karbon, implementasi carbon credit secara luas, pengalihan subsidi fosil ke subsidi ET secara bertahap, peningkatan penggunaan gas bumi disektor industri, peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga dan infrastruktur pendukungnya, da pengembangan sistem jaringan kelistrikan melalui interkoneksi dan smart grid .

## b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi

penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk energi baru dan terbarukan, penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

### III Perbandingan visi, misi dan program Capres 2024 Bidang Lingkungan Hidup

Capres 1 punya 8 misi disebut 8 jalan perubahan, Capres 2 punya 8 misi, disebut 8 misi Asita, dan Capres 3 punya 8 misi. Ketiga Capres memasukkan bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam misi mereka. Berikut perbandingannya

Capres No urut 1 (Anies – Muhaimin)	Capres No urut 2 (Prabowo -Gibran)	Capres No urut 3 (Ganjar- Mahfud)
Memiliki 2 misi lingkungan yaitu misi di urutan 1 yaitu  Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air, dan misi urutan 3 yaitu Mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang.	memiliki 1 misi yang terkait isu lingkungan hidup yaitu  Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.	Memiliki 1 misi yang terkait lingkungan hidup yaitu  Mempercepat Pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah.

Dari misi tersebut, para capres ini menurunkan program kerja, dan WWF-Indonesia menjelaskan dari konteks yang berhubungan dengan lingkungan, yaitu:

No	Hal	Capres No urut 1 (Anies - Muhaimin)	Capres No urut 2 (Prabowo -Gibran)	Capres No urut 3 (Ganjar- Mahfud)
1	<b>Pangan</b>	Pasangan Capres No 1 memiliki sekurangnya 3 program pangan dengan 13 sub program dan 9 sub program.	Pasangan Capres no 2 memiliki sekurangnya 18 program pangan	Pasangan Capres no 3 memiliki sekurangnya memiliki 5 program terkait isu pangan.
2	<b>Air</b>	Pasangan Capres No 1 memiliki sekurangnya 8 program terkait isu ketahanan air.	Pasangan Capres no 2 memiliki sekurangnya 8 program terkait swasembada air	Pasangan Capres no 3 tidak memiliki program terkait isu ketahanan maupun swasembada air
3	<b>Energi</b>	Pasangan Capres No 1 memiliki 14 Program terkait isu energi.	Pasangan Capres no 2 memiliki 7 program terkait isu energi.	Pasangan Capres no 3 memiliki 2 program terkait isu energi yang masuk dalam Ekonomi hijau
4	<b>Lingkungan Hidup</b>	Pasangan Capres No 1 memiliki sekurangnya 9 Program terkait isu lingkungan hidup.	Pasangan Capres no 2 memiliki sekurangnya 2 program terkait isu lingkungan hidup.	Dan Pasangan Capres no 3 memiliki sekurangnya 5 program terkait isu lingkungan hidup
5	<b>Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru</b>	Pasangan Capres No 1 memiliki sekurangnya 8 Program ekonomi hijau dan 10 Program ekonomi maritim dan kelautan.	Pasangan Capres no 2 memiliki sekurangnya 15 program ekonomi hijau dan 15 Program Ekonomi Biru.	Dan Pasangan Capres no 3 memiliki sekurangnya 4 program ekonomi hijau dan 8 Program Ekonomi Biru
6	<b>Adaptasi dan mitigasi Krisis Iklim</b>	Pasangan Capres No 1 memiliki sekurangnya 6 Program adaptasi dan mitigasi dampak krisis iklim.	Pasangan Capres no 2 tidak memiliki program khusus adaptasi dan mitigasi krisis iklim.	Dan Pasangan Capres no 3 memiliki sekurangnya 1 program adaptasi dan mitigasi krisis iklim

# Penjelasan Masing-masing Isu Di Atas

## 1. Pangan

Sebagai perbandingan, beberapa hal terkait program pangan dari tiga capres adalah sebagai berikut

Hal	Anies-Muhaimin	Prabowo- Gibran	Ganjar- Mahfud
Penambahan luas panen tanaman pangan	Tidak ada target luas	Minimal 4 juta hektar tercapai pada tahun 2029	Tidak ada target luas
	Melaksanakan kebijakan afirmasi bagi petani untuk memperoleh akses terhadap lahan	<p>Pengembangan program food estate.</p> <p>Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan pertanian dengan sistem tumpangsari.</p> <p>Merevitalisasi jutaan hektar lahan yang rusak menjadi lahan produktif bagi peningkatan produksi pangan untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional</p> <p>mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional Guna mencapai swasembada pangan dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi dan berkelanjutan dengan komoditas padi, tebu, sagu dan sukun.</p>	Menghentikan alih guna lahan untuk memastikan lahan subur dan lahan produktif diberikan kepada petani kecil dan buruh tani, serta diperkuat dengan pengelolaan tata ruang yang adil dan berkelanjutan

Hal	Anies-Muhaimin	Prabowo- Gibran	Ganjar- Mahfud
Pupuk, Bibit. Pestisida	Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk, bibit, pestisida, pakan ternak dan obat-obatan pertanian	Pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan termasuk akses langsung pupuk, benih dan pestisida kepada petani	Mendukung petani, peternak dan nelayan dengan alat modern, benih unggul, pupuk berkualitas, murah dan tepat waktu.
Riset	Memperkuat riset dan inovasi bibit, benih dan pupuk serta memfasilitasi penerapan hasil riset nasional di lapangan	memperkuat program program di BUMN, universitas dan Lembaga penelitian di bidang pemuliaan tanaman dan teknologi benih	Membangun industri pangan berdaya saing dengan megutamakan sumber pangan local untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah melalui fasilitasi penelitian dan teknologi pangan ramah lingkungan
Jaminan pasar	<p>Melaksanakan Revolusi Agromaritim dimana untuk produk tertentu pertanian, petani tidak perlu memikirkan pasar dan harga jual, sehingga petani dapat fokus pada peningkatan produktivitas. Pasar dan harga jual akan difasilitasi oleh pemerintah melalui tata niaga yang transparan dan akuntabel demi tercapainya kesejahteraan petani.</p> <p>Meminimalkan impor dan meningkatkan produksi pangan untuk mengurangi resiko dan gejolak pasokan pangan akibat perubahan iklim dan dinamika geopolitik</p>	<p>Menjamin ketersediaan pangan pokok yang berkelanjutan melalui BUMN holding pangan ID FOOD, menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak dan nelayan, sekaligus terjangkau bagi konsumen.</p> <p>Memperkuat tata kelola impor pangan pokok dan utama agar lebih efektif dan optimal sehingga tetap mampu menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama disaat panen raya</p>	Menjamin ketersediaan pangan dalam negeri, aman, berkualitas, murah dan terdiversifikasi berbasis kearifan local serta mendukung Desa Mandiri Pangan. Memastikan pangan murah melalui stabilisasi harga pangan

<p>Diversifikasi pangan</p>	<p>Mendorong diversifikasi bahan pangan berbasis produk local</p>		<p>Menjamin ketersediaan pangan dalam negeri, aman, berkualitas, murah dan terdiversifikasi berbasis kearifan local serta mendukung Desa Mandiri Pangan. Memastikan pangan murah melalui stabilisasi harga pangan</p>
<p>Kelembagaan pangan</p>	<p>Melaksanakan transformasi kelembagaan guna memperbaiki koordinator sektor pangan antar kementerian dan lembaga (K/L) terutama antara beberapa fungsi di bawah kementerian yang mengurus perindustrian, perdagangan dan pertanian</p> <p>Penyediaan pendanaan murah dan mudah untuk membantu meningkatkan hasil produksi pangan dan harkat kehidupan petani, pekebun dan peternak pada setiap tahapan produksi</p>	<p>memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi BAPENAS, BULOG, Bersama BUMN holding pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya.</p> <p>Mendirikan lembaga pembiayaan untuk usaha tani rakyat untuk memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, dan pengembangan usaha</p>	
<p>Tata kelola</p>	<p>Membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi dan logistik untuk menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi</p> <p>Menyediakan penyuluh pertanian di setiap desa untuk membantu petani mempraktikkan teknik pertanian terkini dan terbaik melalui program BAHU DESA ( bantuan hukum dan usaha)</p> <p>Menyebarkan tenaga kerja produktif dan meningkatkan produksi pangan untuk memanfaatkan momentum bonus demografi</p> <p>Mengakhiri praktik monopoli bibit, pupuk, pakan ternak dan penyerapan produk</p>	<p>mempercepat Pembangunan infrastruktur pertanian</p> <p>memperpendek rantai distribusi hasil hasil pertanian</p> <p>meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisme pertanian, inovasi digital (digital farming) dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian</p> <p>memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mendorong pengembangan industry pupuk bio</p> <p>menjadikan pengendalian hama terpadu sebagai kebijakan utama dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman, serta mendorong pemanfaatan pestisida nabati dan bio</p>	<p>Mendukung petani, peternak dan nelayan dengan alat modern, benih unggul, pupuk berkualitas, murah dan tepat waktu. Memperbanyak sistem pengairan (waduk, bendungan, embung, irigasi), jalan usaha tani yang memadai, fasilitas cold storage, serta pengolahan dan pemasaran hasil tani, ikan maupun ternak terintegrasi</p> <p>Meningkatkan nilai tukar petani, nilai tukar nelayan dan kesejahteraan peternak, disertai dengan kebijakan perdagangan yang pro produksi dalam negeri</p>

## 2. Air

Sebagai perbandingan, beberapa hal terkait program terkait isu air dari para capres adalah sebagai berikut:

Hal	Anies-Muhaimin	Prabowo- Gibran	Ganjar- Mahfud
Jaminan ketersediaan air	Menjamin setiap rumah di Indonesia, termasuk di kawasan pesisir, kepulauan dan pedalaman dapat menikmati air dengan kualitas yang baik dengan biaya terjangkau	Kecukupan air akan dijamin melalui manajemen air yang baik sehingga tersedia pada saat kemarau dan tidak menyebabkan bencana saat musim hujan	
Pengelolaan sumber daya air	<p>Menjamin kelangsungan sumber daya air melalui penegakkan, pengendalian dan pembangunan berdasarkan tata ruang yang mempertimbangkan konservasi sumber daya air</p> <p>Mewujudkan keberlanjutan sektor air melalui penyediaan infrastruktur daur ulang air, pengolahan air limbah untuk biogas dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengolahan air di tingkat keluarga</p> <p>Memastikan konservasi cadangan air tanah melalui pengendalian eksploitasi air tanah secara masif, serta mendorong kota-kota menerapkan prinsip sponge city</p>	<p>Kecukupan air akan dijamin melalui manajemen air yang baik sehingga tersedia pada saat kemarau dan tidak menyebabkan bencana saat musim hujan</p> <p>menjaga pengelolaan dan pengembangan sumber daya air tetap di tangan pemerintah dengan memperkuat kapabilitas BUMN dan BUMD dalam pengelolaannya</p> <p>meningkatkan program resapan air dan membangun embung embung air sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau</p> <p>melakukan pembersihan Sungai- sungai</p>	

### 3. Energi

Sebagai perbandingan, beberapa hal terkait program terkait isu energi dari para capres adalah sebagai berikut:

Hal	Anies-Muhaimin	Prabowo- Gibran	Ganjar- Mahfud
Bauran energi	<p>Melaksanakan program Indonesia Menuju EBT melalui diversifikasi energi termasuk bioenergi, panas bumi, air terjun, angin, hydrogen dan tenaga surya, dengan dukungan pemerintah dari sisi pembiayaan maupun pemetaan potensi, serta dengan memaksimalkan transfer teknologi</p> <p>Memaksimalkan peran panas bumi dimana Indonesia memiliki sekitar 40% cadangan dunia, sebagai sumber energi penting dengan mendorong penemuan cadangan terbukti oleh pemerintah, untuk menurunkan resiko dan meningkatkan daya tarik investasi</p> <p>MMembuka peluang bagi Masyarakat dan komunitas untuk memproduksi EBT dan memasarkannya ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) guna mendorong pertumbuhan EBT</p> <p>Mendorong inovasi pembiayaan EBT melalui berbagai pendekatan, termasuk project development funding, viability gap financing, dan credit enhancement funding;</p> <p>Memanfaatkan green financing dengan bunga yang kompetitif, dan merealisasikan peluang carbon trading dan bursa karbon guna mendapatkan sumber pendanaan murah dari luar negeri;</p> <p>Membentuk Dana Abadi (Resource Endowment Fund) berasal dari pendapatan sumber daya alam (SDA), yang dialokasikan untuk riset EBT, peningkatan kualitas manusia, dan untuk memberikan insentif bagi penerapan EBT;</p>	<p>Untuk energi Indonesia berpeluang bisa menjadi raja energi hijau dunia melalui pengembangan produk bio diesel dan bio avtur dari sawit, bio ethanol dari tebu dan singkong, serta energi hijau lainnya dari angin, matahari dan panas bumi. Pada tahun 2029 dengan sumber daya alam yang ada, sangat optimis dengan program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 akan dapat tercapai</p> <p>merevisi semua tata aturan yang menghambat untuk meningkatkan investasi baru di sektor energi baru dan terbarukan ( EBT)</p> <p>memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Meningkatkan dan menambah porsi EBT dalam bauran listrik PLN</p> <p>mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam bidang energi baru dan terbarukan (renewables) dan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergy)</p>	<p>Pemanfaatan EBT sebagai generator pembaharuan yang potensinya sekitar 3.700 GW secara bertahap untuk kebutuhan energi dalam negeri, sehingga porsi EBT didalam bauran energi menjadi 25- 30% hingga tahun 2029</p> <p>Desa mampu mendayagunakan sumber energi lokal berbasis energi terbarukan untuk memasok energinya, sehingga menjadi bagian dari gugus penghijauan ekonomi Indonesia</p>

Energi fosil

Meningkatkan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional hingga ke tingkat aman, untuk menjamin ketersediaan BBM dan memungkinkan dilakukannya perencanaan impor yang matang, untuk mendapat harga terbaik

Memperkuat tata kelola importasi energi terutama migas, untuk menekan ruang gerak para spekulan guna memberikan harga terbaik bagi rakyat

Menerapkan teknologi terkini, untuk memaksimalkan efisiensi eksploitasi termasuk menerapkan enhanced oil recovery di berbagai sumur minyak bumi di Indonesia yang sudah tua

Melakukan renegosiasi dan merealisasikan kesepakatan produksi energi yang tertunda, termasuk proyek Masela

mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amatur konstitusi, terutama pasal 33 UUD 1945

memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional

mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/ distribusi gas oleh BUMN atau swasta

#### 4. Lingkungan Hidup

Sebagai perbandingan, beberapa hal terkait program yang mengatur isu lingkungan hidup dari para capres adalah sebagai berikut:

Hal	Anies-Muhaimin	Prabowo- Gibran	Ganjar- Mahfud
Lingkungan hidup berkelanjutan	<p>Mewujudkan pengelolaan SDA yang berorientasi pada kepentingan nasional dan keadilan bagi daerah termasuk dengan memastikan peningkatan kesejahteraan Masyarakat lokal secara berkelanjutan</p> <p>Memperbaiki manajemen eksternalitas lingkungan untuk menjaga kualitas hidup masyarakat sekitar dan memastikan keberlanjutan alam bagi generasi mendatang</p> <p>Meningkatkan praktik Environmental, Social, Governance (ESG) dalam pengelolaan SDA</p> <p>Membentuk Dana Abadi SDA (Resource Endowment Fund) untuk menggerakkan ekonomi baru bagi daerah dalam mengantisipasi menipis dan habisnya cadangan SDA</p> <p>Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilandaskan pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekologis termasuk keadilan antar generasi</p> <p>Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus melibatkan partisipasi rakyat termasuk masyarakat yang terkena dampak, Masyarakat adat, perempuan dan kelompok rentan lainnya.</p>	<p>Percepatan pencapaian komitmen terhadap target pembangunan berkelanjutan termasuk pencapaian target Net Zero emisi GRK akan dilaksanakan.</p> <p>Diantaranya juga dengan mengupayakan penurunan jejak karbon ( carbon footprint) dan jejak water ( water footprint) untuk berbagai produk. Selain itu pemanfaatan bioplastic dalam kehidupan sehari- hari perlu diupayakan sesegera mungkin</p> <p>Merehabilitasi hutan rusak menjadi hutan alam, hutan tanaman industri dan hutan produksi dengan menerapkan skema PPPP ( Public Private People Partnership) dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat</p>	<p>Pemeliharaan hutan, pemangkasan polusi udara dari emisi kendaraan dan industri, pembatasan penggunaan plastik serta transisi energi menuju net zero emission</p> <p>Moratorium deforestasi dan reforestasi, reboisasi, restorasi dan rehabilitasi. Meningkatkan konservasi kawasan hutan sebagai sumber pangan lokal, obat-obatan herbal, air, oksigen, fungsi klimatologis, dan layanan alam bagi kehidupan masyarakat disekitar hutan</p> <p>Revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS), danau, pengembangan kota hijau, industri hijau, dan Gerakan kesadaran gaya hidup bebas sampah serta penerapan regulasi ketat terhadap perusakan lingkungan</p> <p>Pengintegrasian penilaian resiko lingkungan, sosial dan tata kelola (environmental , social, governance/ESG) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem ekonomi dan sistem keuangan</p> <p>Kadarklim- Kampung Sadar Iklim Program promotive di tingkat kampung untuk menahan laju perubahan iklim, dengan fasilitas sanitasi dan drainase yang baik, ruang terbuka hijau, kawasan pejalan kaki, fasilitas public dan pengelolaan sampah yang terintegrasi</p>

Perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup perlu didukung kelembagaan yang kuat serta dapat memenuhi hak akses atas informasi dan partisipasi masyarakat serta tata kelola kolaboratif

Memperkuat penegakkan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan mengedepankan aspek tanggung jawab pemulihan melalui peningkatan kapasitas, kapabilitas dan integritas aparat penegakan hukum

### 5. Ekonomi hijau dan Ekonomi Biru

Sebagai perbandingan, beberapa hal terkait program ekonomi hijau dan ekonomi biru dari para capres adalah sebagai berikut:

Hal	Anies-Muhaimin	Prabowo- Gibran	Ganjar- Mahfud
Ekonomi Hijau	<p>Mencapai target emisi tahunan (2030) demi menyukseskan target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 dan mendukung champion projects berkolaborasi dengan beberapa Pemda untuk mengupayakan NZE di tahun 2050</p> <p>Menetapkan indeks ekonomi hijau sebagai indikator yang relevan untuk mengukur pembangunan berkelanjutan</p> <p>Mewujudkan keberpihakan pada ekonomi hijau dengan mendorong pengintegrasian indeks ekonomi hijau dalam persyaratan perizinan dan dijadikan basis evaluasi risiko di sektor keuangan</p>	<p>mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan dan pembakaran hutan</p> <p>melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari asset bangsa</p> <p>menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong Upaya restorasi, rehabilitasi dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif</p>	<p>Transisi Energi Pemanfaatan EBT sebagai generator pembaharuan yang potensinya sekitar 3.700 GW secara bertahap untuk kebutuhan energi dalam negeri, sehingga porsi EBT didalam bauran energi menjadi 25- 30% hingga tahun 2029</p> <p>Desa Mandiri Energi Desa mampu mendayagunakan sumber energi lokal berbasis energi terbarukan untuk memasok energinya, sehingga menjadi bagian dari gugus penghijauan ekonomi Indonesia</p>

Mendorong transisi berkeadilan yang memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, terutama kepastian lapangan kerja dan perlindungan sosial bagi masyarakat lokal, termasuk memperhatikan kepentingan masyarakat adat dan kelompok rentan terdampak

Memberikan insentif pembiayaan dan kemudahan berusaha bagi sektor hijau untuk peningkatan penciptaan pekerjaan hijau/green jobs dengan kesempatan setara bagi tiap lapisan masyarakat

Memberikan insentif kepada pelaku ekonomi untuk mendorong produksi dan pembelian barang dan jasa rendah emisi, serta untuk mendorong investasi hijau

Mendukung implementasi ekonomi sirkular dengan menerapkan prinsip "9R" yaitu Refuse, Rethink, Reduce untuk tahap desain produk; Reuse, Repair, Refurbish untuk tahap distribusi dan konsumsi; serta Remanufacture, Repurpose, Recycle untuk tahap produksi

Mengimplementasikan nilai ekonomi karbon melalui penerapan pajak karbon, penerapan sistem perdagangan karbon yang inklusif dengan standar dan kriteria yang jelas, serta instrumen lainnya memastikan penurunan bersih emisi gas rumah kaca

memberikan hukuman seberat- beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebarakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi

mengkampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang

meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, Upaya konservasi dan perlindungan genetic, habitat serta ekosistemnya

meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar, langka dan terancam punah

mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif/ lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multi pihak

menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan

akselerasi rencana dekarbonasi untuk tercapai target net zero emission

mengembangkan ekosistem yang terus mengaselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan carbon sink dan carbon offset untuk mengakselerasi target net zero emission dan memanfaatkan kesempatan dan ekonomi hijau

Limbah jadi Berkah Pengelolaan sampah dan limbah yang terintegrasi dan ramah lingkungan agar berkah ekologi dapat terwujud. Mengubah sampah menjadi peluang tambahan penghasilan alternatif bagi rakyat alias berkah ekonomi (waste to cash)

Ekonomi Sirkuler Meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan dengan ganyang plastik dan gebrak polusi melalui pendekatan reduce, reuse, recycle, repair and refabricate (5Rs)

		<p>melanjutkan program mempesiunkan pembangkit listrik tenaga uap dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan</p> <p>melanjutkan program biodiesel dan bio avtur dari kelapa sawit mengembangkan bioethanol dari singkong dan tebu, sekaligus menuju kemandirian komoditas gula</p> <p>mengembangkan sumber energi hijau alternatif terutama energi air, angin, matahari dan panas bumi</p>	
<p>Ekonomi Biru/ ekonomi maritim dan kelautan</p>	<p>Melaksanakan revolusi agromaritim dimana untuk produk laut tertentu nelayan tidak perlu memikirkan pasar dan harga jual, sehingga dapat fokus pada peningkatan produktivitas. Pasar dan harga jual akan difasilitasi oleh pemerintah melalui tata niaga hasil laut yang transparan dan akuntabel demi tercapainya kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan antara lain melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan pendanaan murah dan mudah untuk membantu meningkatkan hasil produksi laut dan harkat kehidupan nelayan</li> <li>• Meningkatkan kemudahan mengurus izin melaut bagi nelayan</li> <li>• Meninjau ulang perhitungan dan implementasi pungutan hasil tangkap yang adil</li> </ul> <p>Mewujudkan kepastian untuk mendapatkan subsidi BBM dan bantuan peralatan melaut termasuk alat penangkapan ikan bagi nelayan</p>	<p>Memastikan kedaulatan pangan berbasis protein hasil laut melalui program perikanan budidaya laut (marine aquaculture) dan perikanan budidaya pantai (coastal aquaculture) serta perikanan laut dalam (deep sea fishing)</p> <p>meningkatkan nilai tambah setiap potensi sumber daya pesisir seperti perikanan tangkap, budidaya udang, budidaya garam, budidaya rumput laut dan budidaya lobster untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat melalui proses industrialisasi yang berkelanjutan</p> <p>meningkatkan produktivitas hasil perikanan dan kemaritiman melalui penyediaan infrastruktur pendukung, kelembagaan berbasis komunitas, peningkatan kompetensi dan kapabilitas, alat tangkap dan sarana prasarana lainnya</p>	<p>tata kelola laut yang inklusif dan berkelanjutan Mengoptimalkan pemanfaatan sektor kelautan dengan potensi US \$ 1,4 triliun pertahun secara inklusif untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan laut</p> <p>Akselerasi 11 potensi maritim (1) Perikanan Tangkap, (2) Perikanan Budidaya, (3) Industri pengolahan hasil perikanan, (4) Industri Bioteknologi kelautan, (5) Pertambangan dan Energi (ESDM), (6) Pariwisata Bahari, (7) Hutan Bakau, (8) Perhubungan laut, (9) Sumber daya wilayah pulau pulau kecil, (10) Industri dan Jasa maritim dan (11) SDA Nonkonvensional</p>

Memanfaatkan posisi strategis Indonesia diantara dua Samudra dan dua pusat ekonomi dunia, dengan mengembangkan pusat perdagangan di selat Malaka dan industri pendukungnya melalui simpul (hub) maritim, Pelabuhan kontainer, industri dan jasa berbasis maritim, pasar komoditas, pusat perdagangan, manufaktur dan properti

Mereformasi tata kelola wilayah laut secara terpadu untuk mewujudkan keunggulan "ekonomi biru" yang ditopang oleh keamanan dan keselamatan pelayaran di seluruh perairan Indonesia, termasuk penjagaan perairan dari penyusup asing;

Mengembangkan sistem transportasi dan pelabuhan laut yang terkoneksi dengan hub maritim global dan sistem transportasi yang terintegrasi dengan infrastruktur darat untuk menumbuhkan industri di kawasan Tengah dan Timur Indonesia;

Mendorong kerja sama riset dan inovasi global bidang maritim dan kelautan untuk memanfaatkan sumber daya kelautan Indonesia, meliputi: biologis, geofisis, geologis dan klimatologis; serta meningkatkan nilai tambah sektoral dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan kepulauan Indonesia

Meningkatkan kualitas dan nilai ekonomis aneka hasil laut baik diproduksi secara budidaya maupun tangkapan dengan pendekatan teknologi dan industri untuk konsumsi domestik maupun ekspor;

membangun armada perikanan untuk melayani laut dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan skema PPPP (Public private people partnership) sehingga nelayan bisa mendapatkan modal dan kapal lebih besar

membangun armada transportasi laut rakyat untuk melayani pulau pulau terpencil dan terluar dengan harga terjangkau

pengembangan Pelabuhan simpul transshipment sebagai tulang punggung Pembangunan infrastruktur terhubung dengan simpul logistic di kawasan timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik

memperkuat kelembagaan dan regulasi pengelolaan pelabuhan dan logistik

mendorong aktivitas inovasi dan penelitian untuk mendukung Teknik budidaya perikanan darat, pengadaan benih, teknologi pakan, pengadaan benih ikan dan teknik pengendalian penyakit

meningkatkan akses keuangan terutama Kredit Usaha Rakyat diektor perikanan dan kemaritiman

menyederhanakan perizinan agar lebih berpihak kepada nelayan

mempercepat penyelesaian pejanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga

Penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zonasi Penangkapan ikan terkendali untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta meratakan distribusi pertumbuhan ekonomi nasional. Penangkapan ikan terukur dibagi dalam beberapa zonasi dimana seluruh kegiatan penangkapan ikan dilaut melalui satelit didukung penggunaan aplikasi digital

perikanan Budidaya berkelanjutan Meningkatkan produktivitas budidaya melalui penetapan dan penataan kawasan budidaya, bahan pakan lokal berkualitas dan peningkatan nilai tambah produk dan pasar yang berfokus pada 5 produk budidaya unggulan yaitu udang, kepiting, lobster, tilapia dan rumput laut

. Maritim Unggul (MU) Penguatan kapasitas konektivitas maritim melalui peningkatan kualitas SDM maritim, sarana dan prasarana transportasi laut, pengoptimalan pemanfaatan alur laut, dan titik sempit (choke points) dengan didukung oleh sistem manajemen transportasi laut yang terintegrasi dengan jalur perdagangan regional dan internasional

Industri Maritim jaya Penguatan industry galangan, industry perikanan dan hasil laut, pengelolaan kampung pesisir, konservasi laut dan terumbu karang, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan sumbangan ekonomi maritim terhadap PDB. Industrialisasi kelautan dilakukan demi gemilangkan pesisir yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir

Menghilangkan praktik penangkapan hasil laut ilegal, unregulated, dan unreported (IUU);

Membantu para nelayan dan pembudidaya untuk mendapatkan fasilitas yang memadai dan terjangkau, termasuk perahu, alat tangkap ikan, depo bahan bakar, fasilitas pelabuhan ikan, teknologi budidaya, cold storage, pabrik es, fasilitas pengawetan, pembiayaan, permodalan, serta perlindungan keselamatan kerja nelayan dan Anak Buah Kapal (ABK);

Membangun Pasar Ikan Rakyat (PIR) di wilayah-wilayah pemukiman nelayan;

Memfasilitasi pembangunan rumah layak bagi keluarga nelayan serta pemberdayaan ekonomi istri dan keluarga nelayan

membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim berbasis pulau-pulau kecil, pulau terluar dan kawasan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat pesisir dan nelayan

mengembalikan kedaulatan Indonesia sebagai poros maritim dengan meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dan menggeluti bidang tersebut. Memastikan sarana dan prasarana tersedia bagi nelayan dan pembudidaya perikanan untuk memperbaiki produktivitas dan menjamin kualitas produk yang dihasilkan

mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga dan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema good neighbour policy

mensinergikan pebagunan jaringan transportasi (darat, laut dan udara) dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu. Pembentukan kelembagaan integrator dari arus barang untuk mengkoordinasi layanan transportasi multimoda dan distribusi logistik

melakukan Pembangunan infrastruktur yang tepat guna untuk menopang industry berbasis pendekatan partisipatif

Wisata maritim Mendunia  
Pengembangan kawasan wisata Bahari, kawasan ekonomi khusus wisata Bahari, serta meningkatkan daya tarik investasi wisata maritim

Mengatasi Pencemaran Laut Menerapkan regulasi yang ketat untuk mengatasi pencemaran laut termasuk pencemaran yang bersifat lintas batas negara

## 5. Ekonomi hijau dan Ekonomi Biru

Sebagai perbandingan, beberapa hal terkait program ekonomi hijau dan ekonomi biru dari para capres adalah sebagai berikut:

Hal	Anies-Muhaimin	Prabowo- Gibran	Ganjar- Mahfud
Adaptasi dan mitigasi	<p>Memprioritaskan kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan komitmen Indonesia dalam ikut mengerem laju pemanasan global</p> <p>Menekan laju kerusakan hutan, konservasi intake forest, dan reforestasi/rehabilitasi untuk memaksimalkan peran hutan sebagai carbon sink</p> <p>Mengoptimalkan restorasi lahan gambut untuk mencegah kebakaran, memperlambat perubahan iklim dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi rakyat</p> <p>Meningkatkan upaya untuk menjaga ekosistem laut dan pesisir, termasuk hutan mangrove dan terumbu karang untuk memaksimalkan potensi blue carbon dan meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat pesisir;</p> <p>Menetapkan batas atas emisi gas rumah kaca dari tiap sektor dan tujuan, kemudian mengintegrasikan target-target penurunannya ke dalam perencanaan dan program setiap kementerian dan lembaga pemerintah terkait, serta aktor non- pemerintah; Membangun kapasitas masyarakat rentan dalam upaya adaptasi dampak perubahan iklim, seperti petani dan masyarakat pesisir</p>		<p>Adaptasi dan Mitigasi Krisis Iklim Penghijauan wilayah pesisir, ruang terbuka hijau memadai, mitigasi bencana, serta transportasi umum yang nyaman, aman dan ramah lingkungan diikuti penerapan teknologi digital bagi petani dan nelayan</p>

## Penutup

WWF-Indonesia hanya menyajikan perbandingan visi, misi dan program Capres 2024, tidak membuat analisa apapun terkait hal ini. Namun dalam bagian A dan B tulisan ini, kami sudah menuliskan kedudukan visi, misi dan program presiden dalam perencanaan Pembangunan dan tahapan Pembangunan dalam rancangan terakhir (rancangan teknokrat) RPJP Nasional.

Target dan arahan yang jelas untuk RPJM Nasional agar dapat tercapai dalam waktu 5 tahun (atau kurang) dan kesesuaian dengan RPJP Nasional seharusnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan visi, misi dan program capres.